

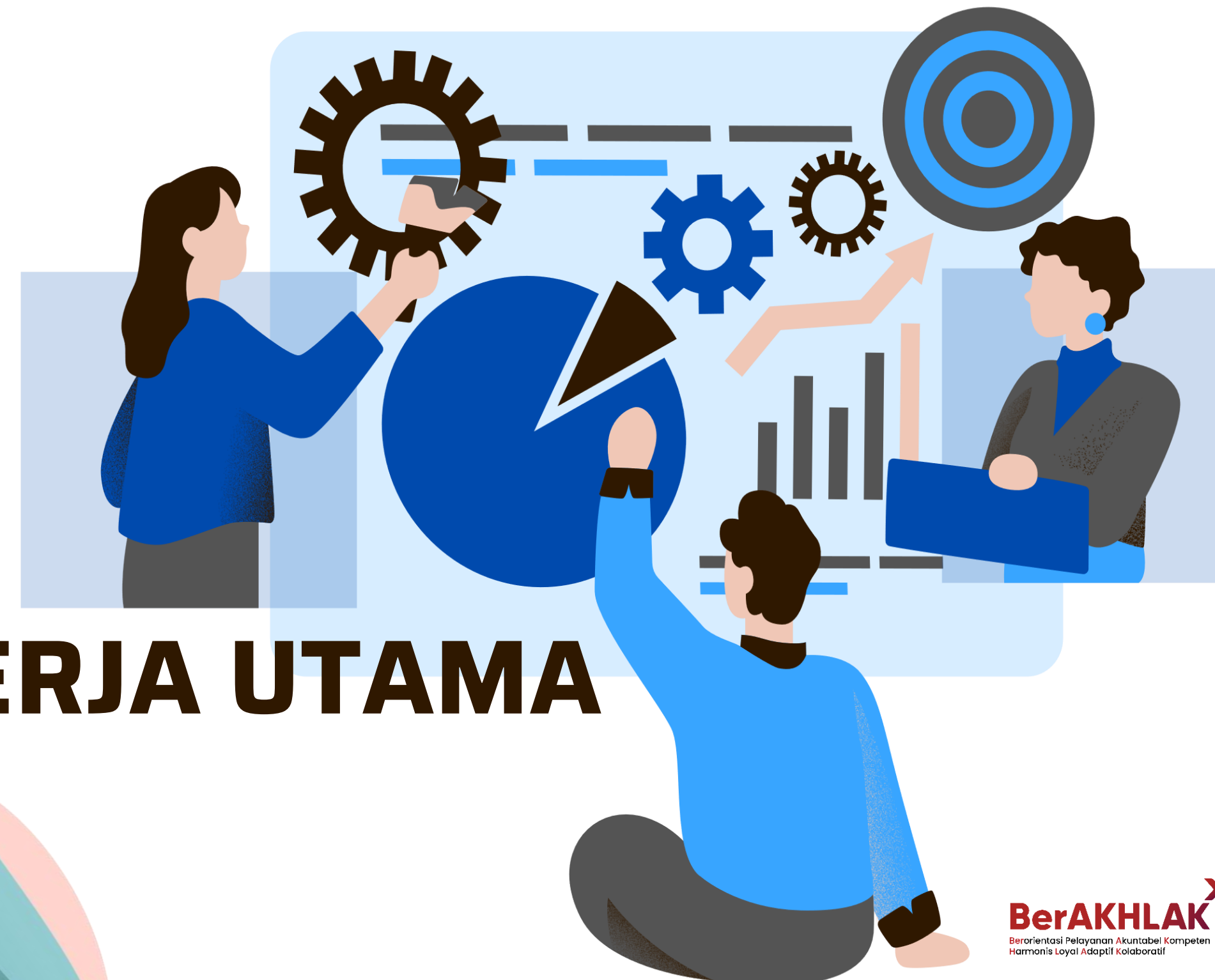


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
#RISETOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



MANUAL INDIKATOR KERJA UTAMA BRPBAPPP TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Perencanaan kinerja merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP, diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPBAPPP - BPPSDM Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Maros, Januari 2025



A.Indra Jaya Asaad



1

Indikator Kinerja:

**Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku
Pendukung yang Disuluh oleh
BRPBAPPP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)				
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun sebelumnya oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDM KP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. CONTOH Kode Registrasi Kelompok : 2.1.12.05.0109.0214 2 : kelompok kelas lanjut (Menjelaskan Kelas Kelompok) 1 : POKDAKAN (Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok) 12 : Provinsi Jawa Barat (Provinsi) 5 : Kabupaten Karawang (d disesuaikan dengan kodefikasi pada masing- masing wilayah) 0109 : bulan dan tahun terbentuk 214 : bulan dan tahun dikukuhkan				
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.				
4	Satuan	:	Kelompok				
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi		() Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros				
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct	



2

Indikator Kinerja:

**Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku
Pendukung yang Ditingkatkan
Kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)							
2	Definisi	:	Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkatkan kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, Camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.							
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkatkan kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, di periode triwulan sesuai dengan Permen KP no 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.							
4	Satuan	:	Kelompok							
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		() Output kendali rendah		(X) Outcome			
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros							
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir			
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize			
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran		() Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct					() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	1 Data Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang meningkat, beserta nama penyuluh perikanan 2 Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker 3 Dokumen penyampaian data dari Eselon III kepada Kepala Pusluh KP							

No.	UPT Penyuluh an KP	Provinsi	Kab/K ota	Nama Kelom pok	Nama Ketua Kelom pok	NIK Ketua Kelom pok	Alamat (Minimal Kecamatan dan Desa)	Bidang Usaha: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/ Pemasaran; Garam, Wisata Bahari, Pengawasan, dan Konservasi)	No Piagam Pengukuhan Kelompok (oleh instansi yg mengukuhkan)	Nomor Registrasi Kelompok yg ditingkatkan	Tanggal Pengukuhan Pembentukan Kelompok (Ketika Pertama kali dibentuk/ Kenaikan kelas Sebelumnya)	Skor Kelas Kelompok				Piagam Kenaikan Kelas Kelompok				Nama Penyuluh Pendamp ing	Status Penyu luh	No. Tlp. Penyul uh
												Semula		Menjadi		Nomor Piagam Kenaika n Kelas	Tanggal Piagam	Jabatan Pejabat yang Mengesa hkan	Link Piaga m/ sertifik at apresi asi			
												Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (pemula, lanjut, madya)	Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (lanjut, madya, utama)							
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).	(21).	(22).	(23).
1.									Nomor pengukan Pemula		tanggal Pemula		Pemula		Madya	Nomor Madya	Tanggal madya					

3

Indikator Kinerja:

**Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku
Pendukung yang Dibentuk oleh
BRPBAPPP (Kelompok)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.			
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikuatkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan			
4	Satuan	:	kelompok			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah		() Outcome
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize		() Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	1. Data Kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang dibentuk (ditambahkan kolom yang berisi Berita Acara Pembentukan beserta nama Penyuluh Kelautan dan Perikanan dan/atau piagam pengukuhan kelompok) 2. Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker 3. Dokumen penyampaian data dari Eselon III kepada Kepala Pusluh KP			



4

Indikator Kinerja:

Nilai PNBP Satker
BRPBAPPP (Rupiah Milyar)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
1	Nama Indikator	:	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)							
2	Definisi	:	• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. • Dasar hukum : - a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP - b PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan - c PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum - d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah							
3	Formula Perhitungan	:	Nilai PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya							
4	Satuan	:	Rupiah Milyar							
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome			
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros							
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir			
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize			
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran		() Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct					() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penya mpai an realisasi PNBP dari Sekretariat BPPSDM KP							



5

Indikator Kinerja:

**Gabungan
Kelompok/Koperasi/Korporasi yang
Mendapatkan Pendampingan di
BRPBAPPP (Unit)**

[illegible]



6

Indikator Kinerja:

**Media Penyuluhan sesuai
dengan kebutuhan Pelaku Usaha
di Satker BRPBAPPP (Paket)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
1	Nama Indikator	:	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)						
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah Materi/ Metode Penyuluhan yang disusun oleh BRPBAPPP , Penyuluh kelautan dan perikanan yang bersifat informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan						
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah Materi dan/atau Metode Penyuluhan yang Ditetapkan						
4	Satuan	:	Paket						
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi		() Output kendali rendah		() Outcome		
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros						
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir		
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize		
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran		(x) Tahunan
10	Metode Cascading	:	() Direct					(X) Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Paket materi penyuluhan (dalam bentuk <i>softfile</i>)						



7

Indikator Kinerja:

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
1	Nama Indikator	:	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)				
2	Definisi	:	1 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan teknologi tepat guna dari teknologi terekomendasi 2 Teknologi terekomendasi yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi teknis, lingkungan, social, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan 3 Hasil dari Percontohan penyuluhan berupa inovasi teknologi tepat guna. 4 Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan ini bertujuan untuk memperoleh inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan sumber daya KP.				
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah kelompok yang mendapatkan percontohan penyuluhan KP dalam kegiatan <i>Smart Fisheries Village</i> upt dan/atau desa				
4	Satuan	:	Kelompok				
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi		() Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros				
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct				() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	Laporan pelaksanaan percontohan penyuluhan pada kelompok pelaku usaha				

8

Indikator Kinerja:

**Jumlah Penyuluh Perikanan
yang Lulus Penilaian Kompetensi
di BRPBAPPP (Orang)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
1	Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)						
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.						
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh <i>Assesment Center</i> KKP						
4	Satuan	:	Orang						
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome		
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros						
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir		
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize		
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran		(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct					() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	1 Data Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian Kompetensi <i>by name by address</i> beserta link Sertifikat/ Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP. 2 Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan						

No.	UPT Penyuluhan	Nama	NIP	Alamat	Nomor Tlp.	Provinsi	Kab/Kota	BIDANG SERTIFIKASI: Kenaikan Jenjang S1 : 1. Pertama ke Muda 2. Muda ke Madya 3. Madya ke Utama D3 : 1. Terampil ke Mahir 2. Mahir ke Penyelia	Lokasi PenKom	Tanggal Uji Kompetensi	No. Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Link Sertifikat/ Surat Keterangan
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(13).	(14).	(15).
1													
2													

9

Indikator Kinerja:

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)			
2	Definisi	:	- Merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. - Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025			
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan perikanan yang lulus pelatihan teknis}}{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah		() Outcome
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize		() Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct
11	Bukti Dukung	:	- Data Penyuluh kelautan dan Perikanan yang lulus Sertifikasi Pelatihan Teknis <i>by name by address</i> beserta link Sertifikat/ Surat Keterangan dari Penyelenggara. - Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan			

10

Indikator Kinerja:

**Kemitraan yang Disepakati
dan/atau Ditindaklanjuti di
Satker BRPBAPPP (Dokumen)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
1	Nama Indikator	:	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)					
2	Definisi	:	Jumlah dokumen kerja sama Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani / disepakati sebagai mana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.					
3	Formula Perhitungan	:	Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bersama para pihak kerja sama					
4	Satuan	:	Dokumen					
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome	
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros					
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Semesteran		() Triwulanan (X) Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct				() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani					

11

Indikator Kinerja:

**Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPP (%)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
1	Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)						
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran.						
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusat Penyuluhan KP}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Penyuluhan KP}} \times 100\%$						
4	Satuan	:	%						
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome		
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP						
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir		
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize		
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran		() Tahunan
10	Metode Cascading	:	() Direct					(X) Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP						

12

Indikator Kinerja:

**Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran BRPBAPPPP(Nilai)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
1	Nama Indikator	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)
2	Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
3	Formula Perhitungan	:	

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
4	Satuan	:	Nilai						
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome		
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Maros Bagian Keuangan						
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir		
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize		
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		(X) Semesteran		() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct				() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan						



13

Indikator Kinerja:
Penilaian Mandiri SAKIP
BRPBAPPP (Nilai)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan																												
1	Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)																												
2	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																												
3	Formula Perhitungan	:	Nilai PMSAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30 %), pengukuran kinerja (30 %), pelaporan kinerja (15 %), dan evaluasi kinerja (25 %). Nilai PMSAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>					Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan	A	>80 - 90	Memuaskan	BB	>70 - 80	Sangat Baik	B	>60 - 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 - 50	Kurang	D	0 - 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																													
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan																													
A	>80 - 90	Memuaskan																													
BB	>70 - 80	Sangat Baik																													
B	>60 - 70	Baik																													
CC	>50-60	Cukup																													
C	>30 - 50	Kurang																													
D	0 - 30	Sangat Kurang																													
4	Satuan	:	Nilai																												
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi30		(X) Output kendali rendah		() Outcome																								
6	Sumber Data	:	BRPBAPPP Bagian Monev																												
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir																								
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize																								
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran		(X) Tahunan																						
10	Metode Cascading	:	(X) Direct					() Non-Direct																							
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusluh KP dari Sekretariat BPPSDM KP																												

14

Indikator Kinerja:

**Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran BRPBAPPP (Nilai)**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan																	
1	Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)																	
2	Definisi	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.																	
3	Formula Perhitungan	:	Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{Penggunaan_{SBK}} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Satker CRO : Capaian RO Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektifitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table>							Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektifitas Satker	45	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25
Variabel	Uraian	Bobot (%)																		
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30																		
	2. Nilai Efektifitas Satker	45																		
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25																		
4	Satuan	:	Nilai																	
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome													
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)																	
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir													
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize													
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran		(X) Tahunan											
10	Metode Cascading	:	(X) Direct				() Non-Direct													
11	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Sekretariat Jenderal																	



15

Indikator Kinerja:

**Indeks Profesionalitas
ASN BRPBAPPP (Indeks)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
1	Nama Indikator	:	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)
2	Definisi	:	Profesi onalitas adal ah kualitas para anggota profesi terhadap profesi nya serta deraj at pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk mel akukan tugas tugasnya. Aparatur Si pil Negara yang sel anj ut nya di si ngkat ASN adal ah profesi bagi Pega wai Negeri Si pil dan Pega wai Pe meri ntah dengan Perjanjian Kerj a yang bekerja pada i nstansi pe meri ntah Pengukuran Indeks Profesi onalitas Aparatur Si pil Negara adal ah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3	Formula Perhitungan	:	• Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a)Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. • Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$ $W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$ $W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$ $W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
4	Satuan	:	Indeks					
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome	
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO					
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct				() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP					

16

Indikator Kinerja:

**Persentase Rencana Umum
Pengadaan PBJ yang Diumumkan
pada SIRUP BRPBAPPP (%)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
1	Nama Indikator	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)							
2	Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka paketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.							
3	Formula Perhitungan	:	Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP Pagu Pengadaan Barang/Jasa × 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100 % maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini							
4	Satuan	:	%							
5	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah		() Outcome			
6	Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ							
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir			
8	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize			
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		(X) Triwulanan		() Semesteran		() Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct					() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ							

17

Indikator Kinerja:

**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan
BMN di BRPBAPPP (%)**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
1	Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPBAPPP (%)				
2	Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
3	Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2 Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3 Tersedianya usulan Pendahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4 Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)				
4	Satuan	:	Unit				
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah		() Outcome	
6	Sumber Data	:	Sekretaris BPPSDM KP				
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize		() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran		(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct			() Non-Direct	
11	Bukti Dukung	:	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP				



Terima Kasih.